

**MEWUJUDKAN *GOOD ZAKAT GOVERNANCE* MELALUI PSAK 109
DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM
(Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

ST. FATIMAH

NIM. 90400114156

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Fatimah

Nim : 90400114156

Tempat/Tgl. Lahir : Mala-Mala, 28 April 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Pelita Borong Bulu, Bontoala Kec. Pallangga

Judul : Mewujudkan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S

St. Fatimah

NIM: 90400114156

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara **St. Fatimah**, NIM: 90400114156, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, “*Mewujudkan Good Zakat Governance melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 13 Agustus 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Pembimbing II



Jamaluddin M, SE., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Mewujudkan Good Zakat Governance melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)*” yang disusun oleh **ST. FATIMAH**, NIM: **90400114156** Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2018, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2018
19 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
Sekertaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Penguji I : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Penguji II : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Pembimbing II : Jamaluddin M., SE., M.Si.



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Penguasa Alam Semesta, dan dengan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Mewujudkan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, patut penulis mengucapkan rasa terima kasih sebagai ungkapan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Teristimewa kepada Ayahanda **Ahmar** dan Ibunda **Syamsudduha** yang sampai saat ini telah mengerahkan segala usaha, do'a, harapan dan pengorbanan, baik dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan hiburan, semangat, motivasi dan bantuan materi dalam menyelesaikan studi.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Musafir Pabbabari, M.Ag. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Jamaluddin M. SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, sekaligus selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Memen Suwandi, SE.,M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus dosen penguji II yang telah memberikan arahan yang membangun.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd sebagai penguji I yang telah memberikan arahan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Saiful, SE., M.SA, Ak. Selaku penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.

8. Teman-temanku jurusan akuntansi yang tak dapat kusebutkan satu persatu, dan teristimewa kepada teman-teman akuntansi 78, terima kasih atas dukungannya dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.
9. Sahabat- sahabatku yang tak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh pegawai dan staff BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan partisipasi dan informasi mengenai judul yang diteliti oleh penulis.

Akhirnya, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan generasi selanjutnya yang akan melakukan penyelesaian tugas akhir.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

St. Fatimah
90400114156

DAFTAR ISI

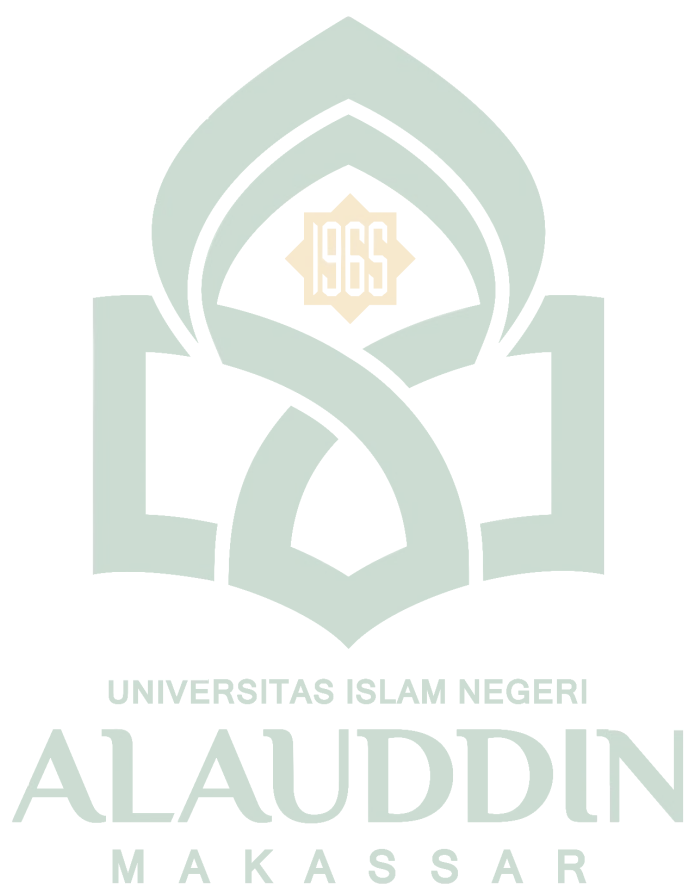
SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Penelitian Terdahulu	9
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	16
A. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	16
B. <i>Stewardship Theory</i>	18
C. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah	20
D. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	29
E. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	32
F. <i>Good Governance</i>	41
G. <i>Good Zakat Governance</i> : Akuntabilitas dan Transparansi	44
H. Akuntansi Zakat dalam Mencapai <i>Good Zakat Governance</i>	47
I. Rerangka Pikir	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Instrumen Penelitian	55
F. Teknik Analisis Data	55
G. Pengujian Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	58
B. Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS	

Provinsi Sulawesi Selatan.....	63
C. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Se- dekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.....	70
D. Perwujudan <i>Good Zakat Governance</i> melalui PSAK 109.....	76
BAB V PENTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pikir.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	61



ABSTRAK

NAMA : ST. FATIMAH

NIM : 90400114156

JUDUL : MEWUJUDKAN *GOOD ZAKAT GOVERNANCE* MELALUI
PSAK 109 DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada BAZANAS Provinsi Sulawesi Selatan dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah serta perwujudan *good zakat governance* melalui PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga informan dari pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari data internal perusahaan, laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, dan beberapa studi pustaka.

Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengelola zakat mulai dari kegiatan penghimpunan, pendistribusian, sampai pada pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Namun, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dengan format laporan keuangan menurut PSAK 109. Sehingga perwujudan *good zakat governance* dibidang pelaporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai karena belum diterapkannya PSAK 109.

Kata Kunci: Akuntansi zakat dan infak/sedekah, PSAK 109, *good zakat governance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*) dan mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu menyebarkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya, serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah SWT. Dalam menyebarkan kebaikan, termasuk didalamnya saling tolong menolong antar sesama manusia. Adapun konsep tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban umat muslim mengeluarkan zakat (Habib, 2016). Sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud dari kecintaan hamba terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya sehingga ia bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.

Menurut Istutik (2013) Zakat diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. Selain zakat, infak dan sedekah juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemerataan pendapatan yang mampu mengurangi kemiskinan. Terlebih lagi Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan demikian Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi penerimaan zakat, infak dan sedekah terbesar. Dengan potensi tersebut diperlukan adanya organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat, infak dan sedekah

tersebut. Dalam merealisasikan zakat, dibutuhkan empat unsur penting yaitu *muzaki* (orang yang wajib membayar zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta, dan amil (orang atau lembaga pengelola zakat) (Angraeni dkk, 2016; Budiarti dkk, 2017). Dengan demikian, organisasi pengelola zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangatlah penting, seiring dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah muzakki (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat (Ghufraanaka dan Septiarini, 2016; Ipansyah dkk, 2013). Amelia (2012) menyatakan bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten, dan UPZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan adanya aturan resmi dari pemerintah akan memberikan kejelasan mengenai pengelolaan zakat dan pengakuan resmi bagi OPZ yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Untuk itu, dibutuhkan sistem pelaporan keuangan secara baku.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuannya yang diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Istutik (2013) menjelaskan bahwa laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS), untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.

Megawati dan Trisnawati (2014); Raziq dan Yanti (2013); Wati dkk (2016) menjelaskan bahwa pada awalnya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka Forum Zakat (FOZ) mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007, dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ. Menurut Raziq dan Yanti (2013) Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga

pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kristin dan Umah (2011) menyatakan banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat.

Menurut Hisamuddin dan Sholikhah (2014) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada UU no.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK nomor 109. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan ada perkembangan dalam hal pengelolaan zakat yang baik termasuk pencatatannya, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ. Apabila zakat diimplementasikan secara efektif, akan mendorong pihak muzaki menyalurkan kekayaan mereka, yang kemudian akan meningkatkan pencairan zakat, dan pada akhirnya, meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas (Wahab dan Rahman, 2011).

Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan OPZ, sebagian besar OPZ belum menerapkan PSAK 109 secara penuh dan bahkan sebagian OPZ masih menggunakan pencatatan sederhana yang tidak sesuai dengan PSAK 109. Fenomena ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Istutik (2013); Megawati dan Trisnawati (2014); Habib (2016); Fitriasuri dan Jaya

(2017). Dari masing-masing hasil penelitian menunjukkan bahwa OPZ yang ditelitinya belum menerapkan PSAK 109 secara penuh.

Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) dibidang pelaporan keuangan. Menurut Rahman (2015) karakteristik *good zakat governance* diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. Kristin dan Umah (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS melalui PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sangat diperlukan (Pertiwi dkk, 2015). OPZ sebagai pengelola dana umat yang mengandalkan donatur dari umat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) menjadi perhatian utama OPZ sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap umat muslim (Rahman, 2015).

Puspitasari dan Habiburrochman (2013) menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas menempati posisi yang sangat penting bagi organisasi dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam membuat laporan keuangan baik BAZNAS maupun LAZ harus mengacu pada PSAK 109. Menurut Megawati dan Trisnawati (2014) dengan adanya PSAK 109 ini maka setiap OPZ akan memiliki standar pelaporan

yang sama dan sifatnya mengikat. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana ZIS menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan kewajibannya. BAZNAS perlu fokus pada atribut yang top prioritas dalam rangka meningkatkan kinerjanya sehingga kesadaran muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga amil dapat ditingkatkan dengan baik (Ayuniyyah, 2011).

Berbicara mengenai akuntabilitas, maka bukan hanya pada lingkup antara organisasi dengan donatur dalam hal ini adalah muzaki saja. Namun yang dimaksud adalah akuntabilitas yang memiliki cakupan lebih luas. Hal ini berkaitan dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Menurut Triyuwono (2007) *Shariah Enterprise Theory* (SET) dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki kepedulian yang seimbang pada stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. Berdasarkan teori tersebut terlihat bahwa BAZNAS maupun LAZ memiliki tanggungjawab yang sangat besar terlebih kepada bagaimana pertanggungjawaban dana zakat, infak dan sedekah dihadapan Allah SWT yang memiliki kedudukan tertinggi. Akuntabilitas dana ZIS kepada Allah SWT sebagai *stakeholder* utama lebih berat karena menyangkut permasalahan akhirat dan tidak ada satu hal pun yang luput dari dari pengawasan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur/24: 64.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْذِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang. Dan (mengetahui pula) hari (ketika mereka) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) harus memperhatikan pengelolaan dana ZIS dan mekanisme pelaporan keuangannya. Yaitu pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan syariat Islam dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Tata kelola zakat yang baik dapat dilihat dari output yang dihasilkan dari OPZ mengenai peruntukan zakat, infak dan sedekah yaitu hanya terdapat 8 asnaf yang berhak memperoleh zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi penerimaan zakat yang sangat besar. Pemerintah Indonesia telah membentuk BAZNAS di setiap provinsi dan kota. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kota urutan ke 5 yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki potensi penerimaan zakat yang besar.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu OPZ yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud ingin mengetahui sistem pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta perwujudan *good zakat governance* melalui PSAK 109. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“Mewujudkan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari orang muslim. Amelia (2012) menyatakan bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat secara efektif. BAZNAS sebagai organisasi yang menghimpun dana dari umat muslim, kepercayaan dari umat itu sendiri dalam mengelola dana ZIS menjadi salah satu perhatian penting. Semakin tinggi tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZ maka tingkat penerimaan zakat infak dan sedekah pada BAZNAS akan semakin tinggi. Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki, maka dibutuhkan sistem tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) pada BAZNAS.

Good zakat governance memiliki karakteristik diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional BAZNAS terhadap umat muslim. Transparansi dan akuntabilitas dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan yaitu mengacu pada PSAK 109 yang berlandaskan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana perwujudan *good zakat governance* melalui PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Penelitian Terdahulu

Fitriasuri dan Jaya (2017) dalam penelitiannya yang berjudul: Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep Akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat yang ada di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan PSAK 109 pada badan amil zakat masih rendah. Namun pemahaman tentang pentingnya aturan akuntansi zakat sudah baik. Keberadaan IAI sebagai penyusun standar

akuntansi telah diketahui masyarakat, tetapi produk-produknya belum diketahui secara luas. Zakat sebagai hal yang telah diakui secara nasional dan dikelola dengan aturan yang berlaku nasional hanya dipahami sebatas kewajiban sesuai tuntunan syariat Islam.

Ritonga (2017) dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK No. 109. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah.

Habib (2016) dalam penelitiannya yang berjudul: The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah sudah diterapkan pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Penelitian ini adalah studi kepustakaan di mana penekanan dilakukan pada penggunaan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoman pada PSAK 109, yaitu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara

sederhana dengan metode *cash basic*, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas.

Sahnaz (2016) dalam penelitiannya yang berjudul: Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK no 109.

Bashori (2015) penelitiannya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ Di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada BAZ di Jawa Timur dan membahas tentang kesesuaian laporan keuangan BAZ di Jawa Timur dengan PSAK No. 109. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi oleh BAZ di Jawa Timur masih belum efektif dan efisien karena masih menggunakan sistem manual begitu juga tidak digunakannya program yang diberikan oleh BAZNAS pusat yang dapat membantu kinerja BAZ di Jawa Timur, serta sistem akuntansi yang diterapkan oleh BAZ di Jawa Timur masih belum menggunakan PSAK No. 109.

Pujianto dan Asrori (2015) penelitiannya yang berjudul: Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap amil dan

norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan Infak/sedekah. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat di Kota Semarang. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *quota sampling* sehingga diperoleh 32 amil sebagai responden. Pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan

Megawati dan Trisnawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul: Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZ Kota Pekanbaru dalam pelaporan keuangannya telah sesuai dengan PSAK No. 109

Istutik (2013) dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan kondisi faktual bentuk dan komponen laporan keuangan yang dimiliki oleh lembaga amil sebagai cerminan pemahamannya terhadap PSAK No

109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang belum menerapkan PSAK No 109 karena kurangnya pemahaman pengelola lembaga amil terhadap akuntansi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 dalam pembuatan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui perwujudan *good zakat governance* melalui PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Manfaat Penelitian

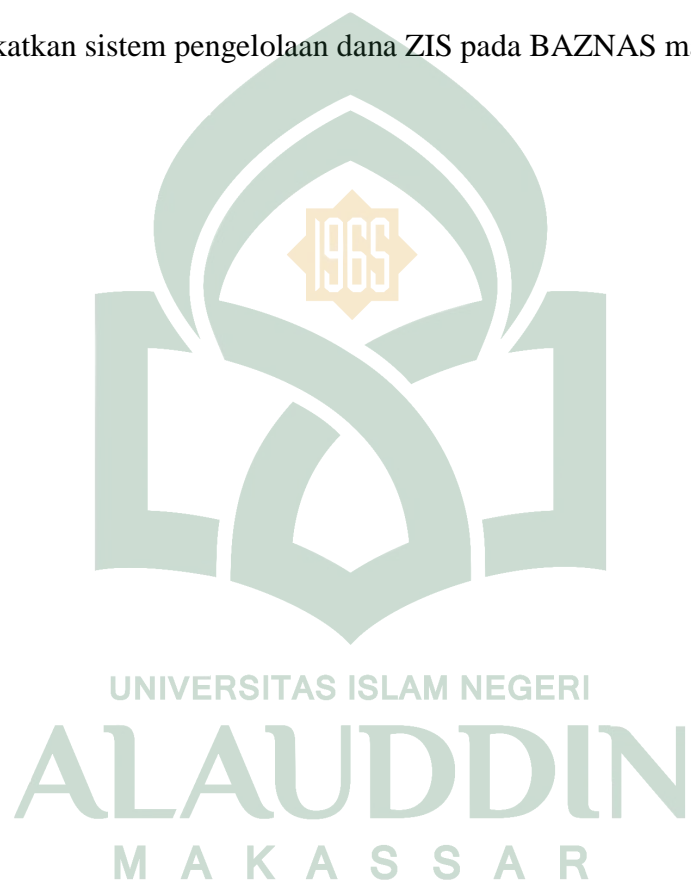
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap *Shariah Enterprise Theory* (SET) dalam mengaplikasikan akuntansi zakat. *Shariah Enterprise Theory* (SET) pertama kali dipopulerkan oleh Iwan Triyuwono (2000). Konsep *Shariah Enterprise Theory* oleh Iwan Triyuwono dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Teori ini sangat menekankan adanya keseimbangan dimana pertanggungjawaban bukan hanya kepada sesama manusia, namun pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia dan alam. Pada penelitian sebelumnya teori ini banyak digunakan pada aspek CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah, namun dengan adanya penelitian ini

Shariah Enterprise Theory (SET) dapat pula digunakan pada aspek pengelolaan ZIS oleh Badan Amil Zakat. *Stakeholder Theory* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1991). Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi *stewardship theory* bahwa para eksekutif tidak hanya bertindak sesuai keinginan principalnya saja, namun juga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh *stakeholder* secara luas.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak BAZNAS sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan secara penuh PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam pelaporan keuangannya. Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 maka transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS dapat terwujud. Semakin transparan dan akuntabel BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS juga akan semakin tinggi. Selain menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman, tentunya pedoman yang paling kuat dan bersifat fundamental adalah al-Qur'an dan sunnah. Maka, BAZNAS dalam mengelola ZIS harus sesuai dengan syariat Islam.
3. Manfaat Regulasi: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para regulator di Indonesia bahwa regulasi yang tertuang dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya

menetapkan bahwa BAZNAS maupun LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengelolaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah daerah. Namun, dalam sistem pelaporan keuangan dibutuhkan standar yang mengaturnya. Oleh karena itu, dibutuhkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. Dengan adanya kedua regulasi yang tentunya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah maka akan meningkatkan sistem pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS maupun LAZ.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) pertama kali diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 2000. *Shariah Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan teori dari *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis yang dibangun bersarkan metafora zakat yang memiliki karakter keseimbangan yang tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga mencakup kepentingan *stakeholders* secara luas (Hermawan dan Rini 2016; Husain dan Abdullah 2015; Indriastusti dan Ifada 2015; Kalbarini 2014; Novarela dan Sari 2015; Samsiyah, dkk. 2013). Bagian yang terpenting dan yang utama dari *shariah enterprise theory* yang harus mendasari setiap penetapan konsepnya adalah kesadaran akan Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh alam (konsep tauhid). Maka dari itu sebagai penerima amanah, manusia hanyalah memiliki hak guna pakai dan bukannya hak milik, sehingga dituntut adanya pertanggung jawaban dalam menggunakan amanah itu dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang pemberi amanah (Soedarso, 2013). Pengembangan *Shariah Enterprise Theory* memberikan sisi baru dalam dunia akuntansi yang berada dalam bentuk keseimbangan material dan spiritual (Husain dan Abdullah, 2015).

Menurut Triyuwono (2007) *Shariah Enterprise Theory* (SET) dikembangkan atas dasar pemahaman memiliki kepedulian yang seimbang pada

stakeholders yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. Allah menempati tempat sebagai *stakeholder* tertinggi karena Allah adalah Maha pencipta akan segala sesuatu. Dengan ditempatkannya Allah sebagai *stakeholder* tertinggi maka ketentuan akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada hukum-hukum Allah sehingga tidak lagi melenceng dari syariat. Manusia yang merupakan *stakeholder* kedua terdiri dari *direct-stakeholder* dan *indirect-stakeholder* (Indriastuti dan Ifada, 2015). *Direct-stakeholder* merupakan pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sedangkan *indirect-stakeholder* adalah pihak yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada perusahaan namun secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan oleh perusahaan. *Stakeholder* ketiga yaitu alam yang juga tak kalah penting. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi perusahaan dimana bumi sebagai tempat berpijaknya atau tempat beroperasinya perusahaan. Selain itu, Allah telah menjadikan alam sebagai tempat tersedianya segala bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Menurut Husain dan Abdullah (2015) Peran *Shariah Enterprise Theory* yang mengedepankan kesadaran akan ketuhanan akan memunculkan situasi dimana manusia sebagai pengolah alam akan selalu tersadarkan. Ditempatkannya Allah sebagai *stakeholder* tertinggi dari manusia dan kemudian menjadikan alam sebagai salah satu *stakeholder* yang juga tak kalah penting maka dalam suatu entitas tindak hanya melihat atau memperhatikan aspek individu saja namun harus berlandaskan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana zakat maka pengelolaan dana tersebut bukan hanya pertanggung

jawaban terhadap sesama manusia (antara muzaki, BAZ, dan Mustahik) namun pertanggung jawaban tersebut lebih condong kepada Allah SWT yang Maha pencipta. Manusia yang berada pada lingkup organisasi (Badan Amil Zakat) harus memiliki kesadaran bahwa segala yang ada dimuka bumi adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pengemban amanah yang diberi tugas untuk mengolahnya sesuai dengan hukum Allah SWT. Maka, segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan zakat, infak dan sedekah harus sesuai dengan syariat Islam.

B. *Stewardship Theory*

Stewardship theory adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991). Menurut Anton (2010), *Stewardship Theory* berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. *Stewardship Theory* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana *steward* termotivasi bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, dan tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasi (Yudianto, 2011). Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya* (Donaldson dan Davis, 1991). *Stewardship theory* lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi/publik. Disini *principal* sebagai pemberi tanggung jawab juga memiliki peran memonitori *steward* dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. *Steward* atau

dalam hal ini pihak BAZNAS juga harus memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya *good governance* yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Husain dan Abdullah (2015) *Stewardship Theory* memandang manajemen sebagai satuan yang dapat dipercayai untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun kepentingan *stakeholder*. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Anwar (2013) bahwa *stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep inti dari *stewardship* adalah kepercayaan yang dibangun secara bersama untuk mempertahankan eksistensi entitas atau organisasi.

Implikasi *stewardship theory* adalah didasarkan pada hubungan kepercayaan antara *muzaki (principal)* dan BAZNAS sebagai pengelola dana (*steward*). *Muzaki* memberikan kepercayaan kepada BAZNAS untuk mengelola dana tersebut demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup umat muslim. Pengelolaa dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana umat tersebut karena pertanggung jawabannya menyangkut *stakeholders* secara luas.

C. Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Sedangkan Infak dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah (Habib, 2016).

Zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu “زكاة” yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَعُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Apabila seseorang telah menunaikan zakat, maka dirinya telah suci (bersih) dari sifat kikir dan tamak serta harta yang dimilikinya juga sudah bersih lantaran tidak ada lagi hak orang lain pada harta tersebut. Sedangkan menurut istilah zakat

adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat memiliki tujuan utama yakni untuk menyeimbangkan pertumbuhan sosial ekonomi dan untuk mensucikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkahi oleh Allah SWT (Sahnaz, 2016). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak hikmah dalam hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik secara merata untuk meminimalisir kesenjangan sosial (Ritonga, 2017). Menurut Mustahal dan Kelib (2017) zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah *nishab*, *haul*, kadar, dan penerimanya. Zakat merupakan satu dari lima pilar Islam. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin ‘Umar bin Khattab ra. Ia berkata “saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : “Islam itu didirikan atas lima

dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat berhaji ke Baitullah, dan berpusa dibulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Kristin dan Umah (2011) kedudukan dan kewajiban zakat sangat mendasar dan fundamental, sehingga zakat sering disebutkan dalam al-Qur'an bersama dengan sholat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 43 dan QS. Luqman/31: 4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat”.

Menurut bahasa infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Allah SWT. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dilekuarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak juga bisa diartikan sebagai menghabiskan sesuatu (kekayaan) untuk kepentingan yang baik, atau untuk kepentingan orang miskin (Wasila dan Sonhadji, 2014).

Berbeda dengan zakat, infak merupakan harta yang sunnahkan untuk dikeluarkan oleh orang muslim yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, serta

penyalurannya tidak ditentukan penerimanya (Bashori, 2015). Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa infak adalah sumbangan yang hukumnya sunnah untuk diberikan kepada seseorang yang hanya terbatas pada pemberian harta saja, serta tidak ditentukan waktu, jumlah, dan penerimanya. Meskipun infak hukumnya sunnah, namun infak sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 254.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Sedekah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Jadi, sedekah dapat diartikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang terhadap Allah SWT. Menurut Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Kristin dan Umah (2011); Mu'is (2011:23) sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Sedekah juga dapat diartikan sebagai segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap ridhon Allah SWT (Rahman, 2015)

Sedekah memiliki hukum yang sama dengan infak yang mana hukumnya adalah sunnah. Namun, berbeda dengan zakat dan infak sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Rahman, 2015). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأُجُورِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ : «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ (رواه امسلم)

Artinya:

Dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari Sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima’) dengan istrinya adalah sedekah. (HR. Muslim).

2. Peruntukan Zakat, Infak, dan Sedekah

Penyaluran zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Menurut Hisamuddin dan Sholikha (2014); Nahdiah (2016) golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
- b. Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha itu belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
- c. Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang hatinya telah ditaklukkan dan dikukuhkan kepada agama islam. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang baru saja masuk agama Islam, orang yang belum masuk Islam tapi hatinya dihidupkan terhadap nilai-nilai islam, dan orang-orang yang sudah mengenal islam, namun masih enggan melaksanakan ajaran agama islam,

- e. *Riqab*, yaitu budak atau hamba sahaya. Kata ini merupakan kata kiasan, yakni seolah-olah leher mereka diikat dengan tali sehingga tidak dapat bebas bergerak.
- f. *Ghorim*, yaitu orang yang terlilit hutang, namun tidak mampu untuk membayarnya. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ghorim, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki hutang sedang harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasinya.
- g. *Fisabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h. *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, tetapi tidak bertujuan untuk berbuat maksiat atau biasa disebut *musafir*.

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki ketentuan khusus mengenai golongan yang berhak menerimanya. Infak dan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja yang kita kehendaki, namun dalam al-Qur'an dianjurkan untuk mengutamakan kerabat terdekat yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَدْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat jiwa (*Nafs*) dan zakat harta (*Mal*).

Zakat *nafs* atau yang juga dinamai dengan *zakatul fithri* adalah zakat yang dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal yang dapat berupa bahan pangan atau dapat pula digantikan dengan uang sesuai dengan harga bahan pangan yang disalurkan (Kristin dan Umah, 2011; Setyawan, 2015). Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan menyucikan harta apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Kristin dan Umah, 2011). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, zakat *mal* terdiri dari:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Besarnya nisab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram dan jika telah sampai setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- b. Uang dan surat berharga lainnya. Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat emas dan perak karena dianggap bahwa uang memiliki nilai yang dapat ditukarkan dengan emas dan perak.
- c. Perniagaan. Zakat perniagaan sama dengan zakat perdagangan. Besarnya nisab untuk zakat perdagangan setara dengan emas yaitu 85 gram dan setelah sampai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai

nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nisab atau belum. Jika telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini adalah zakat yang dikenakan atas produk atau hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini dikeluarkan setiap setelah panen apabila mencapai nisab.
- e. Peternakan dan perikanan. Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat pertanian, yaitu zakatnya dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan tanpa menunggu haul.
- f. Pertambangan. Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nisab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun.
- g. Perindustrian. Zakat ini sama dengan zakat perusahaan. Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.
- h. Pendapatan dan jasa. Zakat ini disebut juga dengan zakat profesi. Kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor yang diperolehnya.
- i. Rikaz. Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung

dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu *haul*.

D. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang bergerak dibidang pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dan zakat, infak, dan sedekah. Organisasi zakat juga dapat disebut sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif yang membantu menghilangkan riba dari masyarakat muslim (Mohsin, 2015). Menurut Hisamuddin dan Sholikhah (2014) organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan sedekah harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat. OPZ dibentuk dengan tujuan membantu umat islam menyalurkan dana ZIS sebagai sarana ibadah (Candra, 2017; Pujianto dan Asrori, 2015). Menurut Angraeni dkk (2016) zakat dapat direalisasikan apabila unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat telah tersedia. Adapun keempat unsur yang dimaksud, yaitu *muzaki*, *mustahiq*, harta, dan amil. Dalam hal ini, amil termasuk ke dalam empat unsur penting dalam perealisasi zakat, maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangatlah penting. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat perintah memungut zakat dari para *muzaki*. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban memungut zakat baik dilakukan oleh diri sendiri maupun diwakili oleh OPZ. Menyalurkan ZIS melalui OPZ akan membantu pendistribusian ZIS secara merata dan membantu meningkatkan OPZ baik yang dibentuk langsung oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri BAZNAS (Provinsi dan Kabupaten) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 8 mengenai keanggotaan, BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yaitu 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat (unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam) dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Adapun persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 11 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. beragama Islam;

3. bertakwa kepada Allah SWT;
4. berakhlak mulia;
5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak menjadi anggota partai politik;
8. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Meskipun LAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh masyarakat, namun pembentukan LAZ harus mendapat izin dari pemerintah karena LAZ dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 2 bahwa izin pembentukan LAZ diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan soaial;
2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. memiliki pengawas syariah;

5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. bersifat nirlaba;
7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- dan
8. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi nirlaba. Namun, OPZ memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba yang lain. Hal inilah yang menyebabkan OPZ harus memiliki standar pelaporan keuangan yang terpisah dari organisasi nirlaba lainnya. Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam PSAK No. 45 tentang Organisasi Nirlaba. Sedangkan standar pelaporan keuangan OPZ diatur dalam PSAK No. 109. Adapun karakteristik yang membedakan OPZ dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu (Hisamuddin dan Sholikha, 2014):

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam;
2. sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan
3. biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.

E. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 tentang akuntansi zakat telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2008. Pernyataan ini diterapkan untuk:

1. Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infak/ sedekah.

2. Untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah.

Menurut PSAK No. 109, akuntansi zakat memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pengakuan, pengukuran dan penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Awal Zakat
 - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
 - b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - 1) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - 2) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- c. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- d. Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4. Pengakuan awal infak/ sedekah

- a. Infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/shadaqah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan hargapasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- b. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
5. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah
- Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

6. Penyaluran infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dan infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

7. Dana non halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana

nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

8. Penyajian

Penyajian akuntansi zakat dan infak/ sedekah yaitu Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

9. Pengungkapan

Adapun pengungkapan transaksi akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah sebagai berikut:

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infak atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak atau sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- 4) Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.
- 6) Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah

7) Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat

8) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi:

- a) Sifat hubungan istimewa;
- b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
- c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan yang dijabarkan diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.

10. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan lengkap OPZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut.

a. Laporan posisi keuangan.

Amil menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- 1) Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan akumulasi penyusutan.

2) Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.

3) Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.

b. Laporan perubahan dana.

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- 1) Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- 2) Dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (muqayyadah) maupun infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;
- 3) Dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- 2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;

3) Penambah dan pengurangan;

4) Saldo awal;

5) Saldo akhir.

d. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan SAK lain yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK* lain yang relevan.

F. Good Governance

Good governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu entitas atau organisasi. Menurut Yuliafitri dan Rivaldi (2017) *good governance* dapat menjadi tolak ukur baik tidaknya kinerja suatu organisasi. organisasi yang menerapkan *good governance* akan menambah nilai organisasi dimata *stakeholders* karena tujuan utama implementasi *good governance* adalah untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi (Mukhtaruddin dkk, 2014). Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pada tahun 2004 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator

Ekonomi Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004 untuk memperluas tugas KNKG dan memperluas cakupan tugas sosialisasi *governance* bukan hanya pada sektor korporasi tapi juga pada sektor pelayanan publik.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik. Maka dalam implementasinya OPZ dapat mengadopsi pedoman *good governance* yang berlaku di Indonesia. Penerapan *good governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *good governance* (Candra, 2017). OPZ yang menerapkan *good governance* akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut dalam mengelola dana ZIS. Penerapan *good governance* akan menciptakan tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) pada OPZ.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* mencakup hal-hal berikut (Candra, 2017):

1. *Partisipation*. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang ters edia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. *Responsiviness* (daya tanggap). Proses yang dilakukan disetiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. *Consensus orientation* (musyawarah mufakat). Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik dalam hal kebijakan prosedur.
6. *Equity* (kesetaraan) Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness dan efficiency*. Proses-proses organisasi harus menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Efektif lebih berkaitan dengan tercapainya tujuan, sedangkan efisien lebih berkaitan dengan penghematan waktu.
8. *Accountability*. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk

pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

G. *Good Zakat Governance: Akuntabilitas dan Transparansi*

Sistem *good zakat governance* atau sistem tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan disetiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ dikatakan memiliki sistem *Good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Bashori (2015) Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah. BAZ maupun LAZ sebagai sebagai pengemban amanah dituntut untuk memiliki sikap transparan dan akuntabel dalam mengelola dana ZIS yang disalurkan oleh para *muzaki*. Semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam mengelola dana ZIS, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan semakin tinggi pula (Rahman, 2015). Akibatnya, umat muslim akan termotivasi untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui OPZ.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola organisasi yang mengharuskan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya (Candra, 2017). Menurut Nikmatuayah (2014) akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara *agent* dan *principal* sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Agent* yang dimaksud adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengemban amanah yang harus mempertanggung jawabkan dana ZIS yang disalurkan oleh para *muzaki* (*principal*). Menurut Puspitasari dan Habiburrochman (2013) Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk mengelola dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Salle (2015) menjelaskan bahwa tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen membutuhkan pola akuntabilitas yang dibangun melalui sistem akuntansi agar dapat memberikan peluang terhadap peningkatan informasi yang handal, akurat, dan terpercaya.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban seseorang sebagai khalifah di muka bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang ada di bumi merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT kepada hambanya untuk dikelola dengan baik dan segala sesuatu yang telah dikerjakan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal/8: 27 dan QS. Al-Muddassir/74: 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَّا نَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

2. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan seseorang atau badan usaha kepada *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga organisasi (Candra, 2017). Menurut Rahmat, dkk (2017) transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi alat control bagi publik terhadap organisasi pengelola zakat untuk memperoleh informasi lebih banyak. Apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi pengelolaan ZIS tinggi, maka tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS kepada OPZ juga akan semakin tinggi. Dengan demikian tingkat penerimaan dana ZIS pada BAZ maupun LAZ akan semakin meningkat.

Menciptakan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah akan menciptakan sistem control yang baik antara dua pihak, yaitu OPZ

(pengemban amanah) dan *stakeholder* secara luas. Hal inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan para *muzaki* untuk menyalurkan ZIS kepada OPZ.

H. Akuntansi Zakat dalam Mencapai Good Zakat Governance

Akuntansi dalam hal ini terkhusus pada akuntansi zakat dan infak/sedekah diharapkan mampu untuk mewujudkan *good zakat governance* termasuk didalamnya infak dan sedekah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari akuntansi yang secara khusus mampu untuk mengelola dana-dana terkait ZIS. Akuntansi zakat merupakan aspek yang muncul dari ilmu akuntansi yang akan mempengaruhi OPZ dalam waktu dekat terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ sebagai pengemban amanah dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh masyarakat muslim.

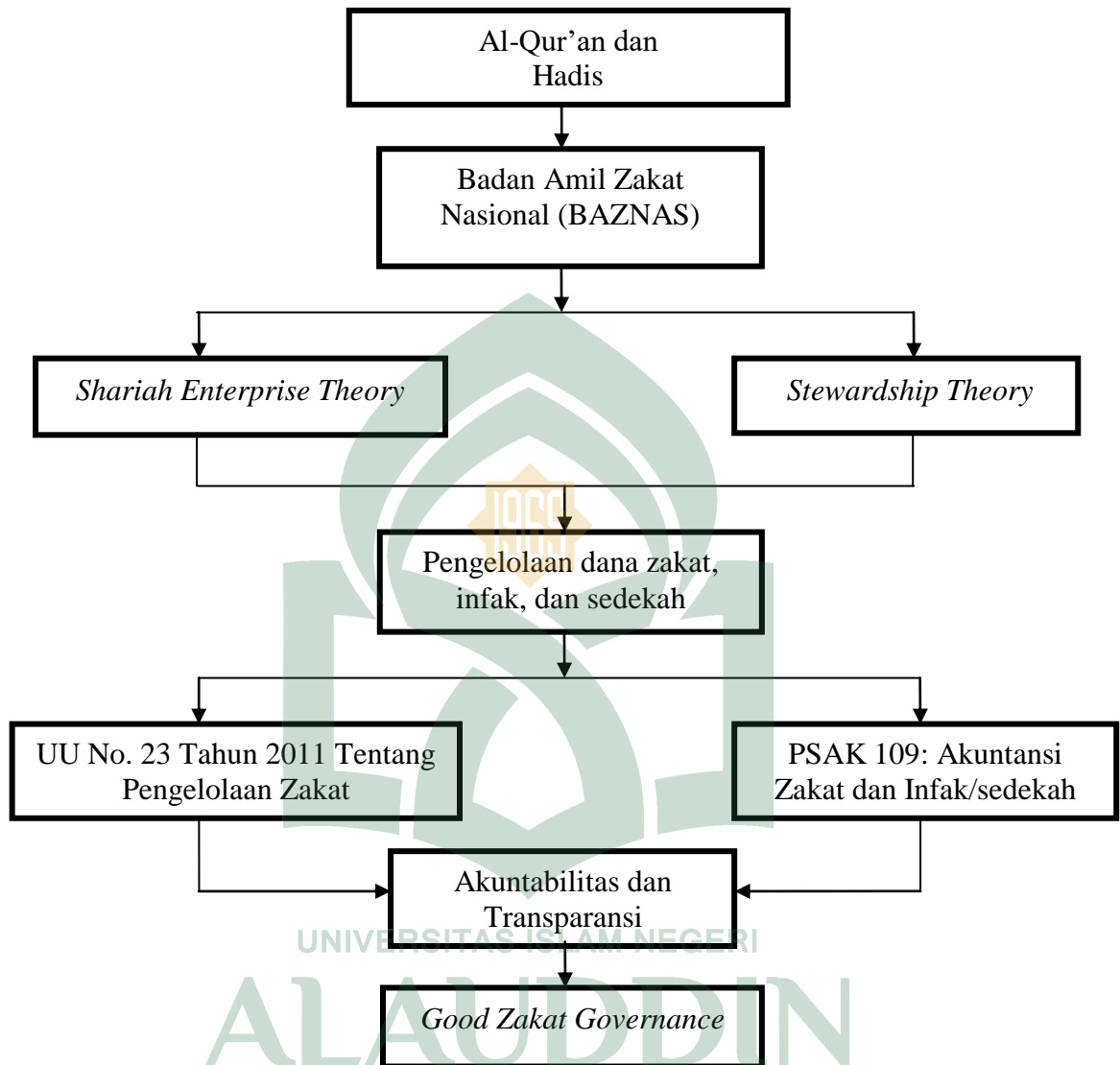
Akuntansi zakat adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Menurut Fitriasisuri dan Jaya (2017) Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai lembaga pemegang amanah, berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat (Raziq dan Yanti, 2013). Dalam pelaporan pengelolaan zakat tersebut adalah bukti perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki peran yang sangat penting bagi OPZ. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat yaitu adanya laporan keuangan yang memuat informasi yang dibutuhkan oleh beberapa pihak baik internal maupun eksternal. (Nahdiah, 2016). OPZ dalam mengelola aktifitas asetnya tidak lepas dari pencatatan akuntansi. Menurut Ghufraanaka (2016) pencatatan pelaporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik, dan benar agar kebenaran pencatatan pelaporan keuangan dapat dipercaya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kristin dan Umah (2011) bahwa akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Oleh sebab itu, OPZ memerlukan standar pelaporan agar *stakeholders* dapat mengawasi dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggung jawaban pelaporan tersebut. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, benar, terciptanya keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pelaporan keuangan, maka aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan OPZ harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah (Rahman, 2015). Dengan demikian, sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas suatu OPZ dalam mewujudkan *good zakat governance*.

I. Rerangka Pikir

Al-Qur'an dan hadis merupakan pegangan utama bagi umat muslim. Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan setiap muslim dalam bertindak atau melaksanakan segala aktivitasnya. BAZNAS merupakan organisasi yang berwenang melaksanakan fungsi atau tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS harus merujuk pada aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat sangat penting untuk menerapkan konsep dari *Shariah Enterprise Theory* dan *Stewardship Theory* dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Konsep dari dua teori tersebut menekankan pada adanya pertanggungjawaban organisasi atau pihak pengelola terhadap *stakeholder* secara luas, yaitu Allah, manusia, dan alam. Teori tersebut juga menekankan bahwa dalam melaksanakan fungsinya harus mengedepankan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi.

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. UU No. 23 Tahun 2011 sebagai supremasi hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dan PSAK 109 sebagai landasan dalam pelaporan keuangan BAZNAS. Dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 dan PSAK 109, maka dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Terciptanya akuntabilitas dan transparan akan mewujudkan *good zakat governance* pada BAZNAS.

Gambar 2.1**Rerangka Pikir**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati (Leo, 2013: 101). Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dibawah partisipan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual dan pemikiran-pemikiran yang mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Mesjid Raya No. 55 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengambil BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian, karena objek tersebut merupakan salah satu OPZ yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana ZIS di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan pada penggunaan teknik analisis deskriptif yang artinya mendeskripsikan temuan dari data-data yang diperoleh dan kemudian akan dianalisis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel atau keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. sugiyono (2005: 89) menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah:

Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih aman yang penting dan akan digunakan dalam penelitian serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan bagaimana peran perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter (*documentary data*). Selain itu jenis data yang digunakan juga adalah jenis data kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Kebijakan akuntansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil penelitian dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. Adapun informan pada penelitian ini adalah:

- a. Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan
- b. Bagian keuangan, IT, dan pelaporan
- c. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan

2. Observasi

Observasi Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2005: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian. Dokumentasi bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAK dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

5. *Internet searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet

guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi pihak yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Selain peneliti, instrumen lain dalam penelitian kualitatif adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang jalannya penelitian tersebut. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, pulpen, alat perekam suara, kamera serta laptop. Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Jadi, peneliti memilih sampel dari orang-orang atau pihak-pihak yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

2. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, traingulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini *shariah enterprise theory* dan *stewardship theory* digunakan untuk memaknai akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman selama teori tersebut juga dapat dikaji secara mendalam.
2. Triangulasi sumber data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian melalui sumber lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih mendistribusikan zakat mereka sendiri.

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat. Pemerintah daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang dikukuhkan pada tanggal 04 September 2001.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pengukuhan Badan Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas permohonan Badan Amil Zakat setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Proses pengukuhan dapat pula dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. adapun persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data musakki dan mustahiq.
- c. Memiliki program kerja.
- d. Memiliki pembukuan.
- e. Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan fungsi dan tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 55 Makassar, terdiri atas satu bangunan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kantor, sekolah, dan klinik.

2. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Visi :

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang efektif dan efisien”

Misi :

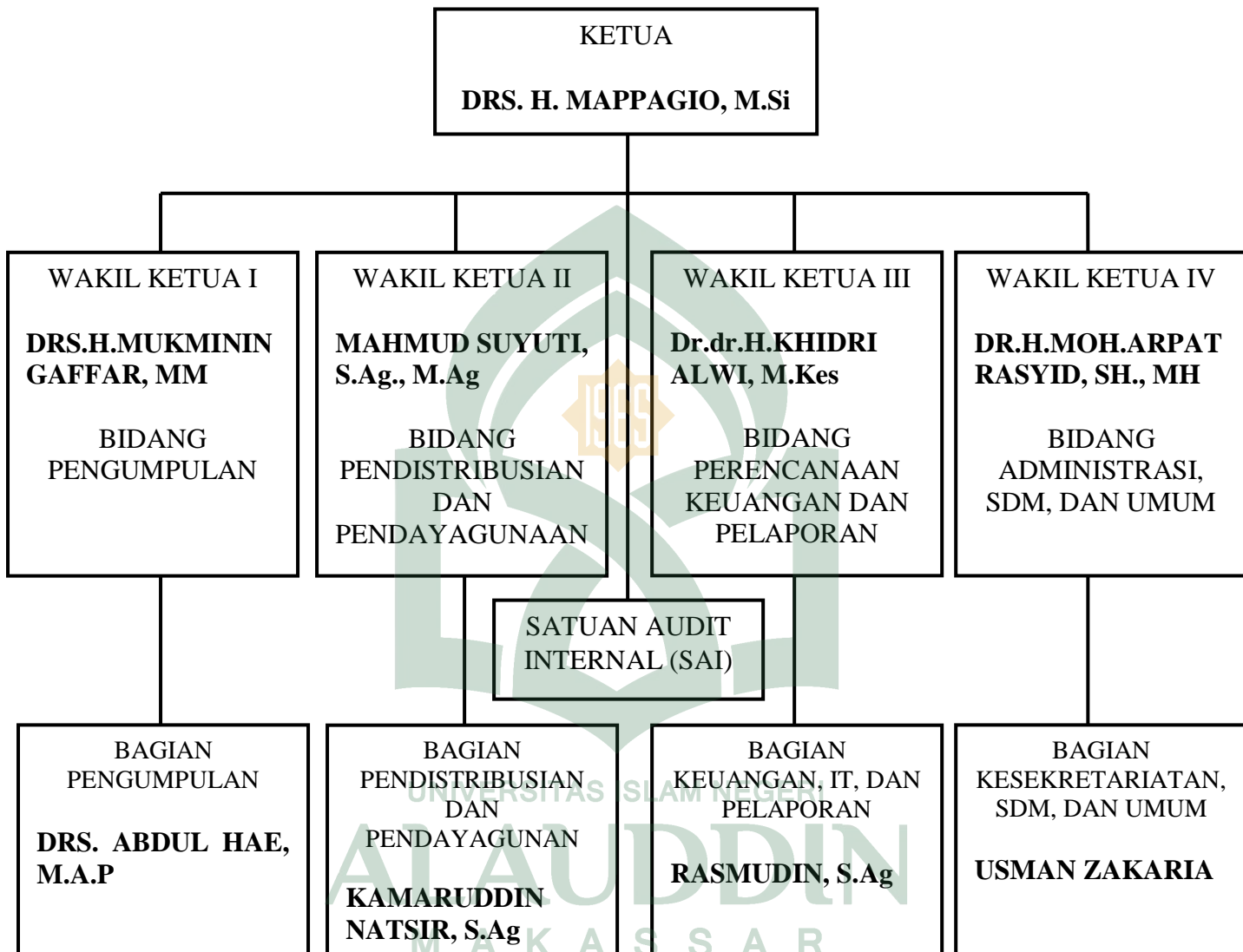
- a. Menyusun daftar nama-nama muzakki dan mustahik.
- b. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Menyusun strategi penetapan amil BAZNAS.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat.
- e. Melaksanakan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat.
- f. Melaksanakan tatakelola keuangan BAZNAS.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam sebuah organisasi diperlukan suatu struktur organisasi. Adanya struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat yang penting agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Suatu organisasi akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dari setiap pegawai apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah dinyatakan dan diuraikan menekankan pada pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas. Adapun struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



4. Program Kerja yang telah Terealisasi

Sejak berdirinya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada kaum dhu'afa. Program kerja yang terealisasi dengan baik diantaranya:

- a. Sekolah Dasar Anak Indonesia (SDAI) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sekolah Menengah Pertama Anak Indonesia (SAMPAI) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keperawatan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Bantuan modal usaha produktif untuk dhu'afa di kabupaten/kota Sulawesi Selatan.
- e. Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Maret 2010. Jumlah member (ibu hamil) 2.800 orang dan yang telah melahirkan sebanyak 825 orang.
- f. Klinik gratis yang mendukung Program Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- g. Bantuan sembako untuk dhu'afa.
- h. Buka puasa bersama dengan 2.000 anak yatim dan dhu'afa tahun 2012, 1.000 anak yatim dan dhu'afa tahun 2013-2014.

B. Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maka dari itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menjalankan empat fungsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembagian tugas dengan membentuk lima komisioner yang dibantu oleh bagian divisi masing-masing.

Dana yang diperoleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari muzaki dan bantuan dari Kementerian Agama. Dana yang berasal dari muzaki yaitu dana yang terdiri dari zakat, infak dan sedekah. Sedangkan bantuan dana dari Kementerian Agama berupa bantuan dana operasional. Akan tetapi, bantuan dana operasional dari Kementerian Agama tidak menutupi semua kegiatan operasional BAZNAS. Sehingga harus mengambil dana zakat untuk menutupinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

Sumber dana BAZNAS ada dua yaitu dari muzakki dan Kementerian Agama. Akan tetapi yang lebih dominan itu dari muzakki. Dari kementerian agama hanya berupa bantuan operasional saja., itupun dana dari Kementerian Agama tidak mengcover seluruh kegiatan operasional BAZNAS (Rasmudin, *Wawancara*, 2018).

1. Penghimpunan Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah merupakan salah satu tugas atau fungsi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan penghimpunan ini merupakan salah satu kewajiban bagi BAZNAS sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dalam proses penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penghimpunan secara langsung, yaitu muzakki menyeter secara langsung zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Penghimpunan tidak langsung/ melalui perantara. Penghimpunan ini dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk disetiap instansi yang ada di Sulawesi selatan. Penghimpunan dengan cara ini menggunakan jasa bank sebagai perantara pembayaran zakat dan infak/sedekah. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa:

Penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang menyeter

langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Disetiap instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang menyetor melalui instansi kemudian mereka mentarnsfer lewat bank (Natsir, *Wawancara*, 2018).

Adapun jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan ada tiga yaitu:

- a. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang disetorkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal.
- b. Zakat maal, yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan apabila telah cukup haul dan nizab.
- c. Zakat profesi, yaitu zakat perorangan yang diambil 2,5% dari penghasilan kotornya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi” (Natsir, *Wawancara*, 2018).

Penghimpunan zakat dan infak/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian, Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengelompokan dana antara dana zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

Kami memisahkan antara dan zakat, dana infak dan dana sedekah. Misalnya ketika ada muzakki yang membayar zakat dan zakat dia yang sebenarnya adalah Rp 375.000 akan tetapi yang dia setorkan adalah Rp. 400.000 dan menginfakkan sisanya, maka kami mencatat Rp. 375.000 masuk didana Zakat dan Rp. 25.000 masuk ke dana infak (Natsir, *Wawancara*, 2018).

2. Pendistribusian Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Pendistribusian zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa:

Sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat dan infak/sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut (Natsir, *Wawancara*, 2018).

Islam telah menetapkan terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Ayat di atas merupakan acuan bagi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendistribusikan zakat. Dana yang telah dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan didistribusikan kepada delapan asnaf. Namun, dalam

pelaksanaanya tidak semua asnaf mendapat pendistribusian zakat. Hal ini disebabkan tidak semua asnaf tersebut ada di daftar mustahik BAZNAS. Misalnya *Riqab* (budak), dizaman sekarang sudah sangat jarng ditemukan budak. Jadi yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakir miskin

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara besar-besaran setiap bulan ramadhan. Pada tahun 2018 tepatnya bulan ramadhan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah mendistribusikan 250 paket sembako dan uang tunai kepada mustahik dari sekitar Rp 1,5 Miliar dana zakat yang terkumpul (Syam, 2018).

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendistribusikan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua bentuk pendistribusian, yaitu:

- a. Konsumtif, pendistribusian ini dibagi habis ke semua mustahik yang terdaftar di BAZNAS. Pembagiannya dapat berupa makanan seperti sembako atau kebutuhan pokok. Dan juga bisa dalam bentuk uang untuk digunakan membeli kebutuhan pokok bagi para mustahik, pendistribusian konsumtif ini dilakukan pada saat bulan ramadhan dan di ambil dari zakat fitrah maupun zakat mal.
- b. Produktif atau bantuan modal usaha. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman kepada pemohon modal usaha yang pelunasannya dilakukan dengan cara dicicil oleh peminjam.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya zakat produktif. Tentang zakat produktif ini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”

Pola pendistribusian zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardul hasan* dan *mudharabah*. Pola *qardul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara *Mudharabah* berarti lembaga pengelola zaakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai pinjaman dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalin yang dibayarkan menurut kesepakatan.

3. Pendayagunaan Dana Zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan dari pendistribusian dana zakat tergantung pada pendayagunaanya. Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana pendayagunaan dana ZIS menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat dimana yang menjadi prioritas penerima dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah fakir miskin.

Bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan agar tepat guna adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung program pendidikan gratis 9 tahun dengan menyediakan sekolah gratis SD, SMP, SMK.

- b. Mendukung program kesehatan gratis dengan menyediakan klinik gratis yaitu Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC).
- c. Bantuan sunatan gratis.
- d. Bantuan pelayanan mobil Ambulance.
- e. Bantuan sembako kepada kaum dhu'afa.
- f. Bantuan modal usaha kepada kaum dhu'afa.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada masyarakat sedangkan bentuk pertanggungjawaban BAZNAS kepada Allah SWT terletak pada bagaimana pengelolaan dana zakat tersebut. BAZNAS sebagai lembaga pemegang amanah dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat bukan karena adanya kepentingan pribadi. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui program-program kemanusiaan yang telah dilakukan. Secara tidak langsung BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan konsep *Syariah Enterprise Theory* dan *Stewardship Theory* dimana pihak BAZNAS bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan *stakeholder*.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemegang amanah, diharuskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat yang disetorkan oleh muzakki. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS terhadap pengelolaan dana tersebut. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi

zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengumpulkan bukti setoran zakat dan bukti penyaluran dana zakat yang kemudian dicatat dalam pencatatan harian. Pencatatan harian dilakukan melalui sistem komputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Segala penerimaan akan diinput melalui SIMBA yang pelaporannya langsung terbaca di BAZNAS pusat. Bentuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam bentuk laporan posisi dana, dimana dalam laporan tersebut memuat jumlah saldo dana zakat disetiap rekening BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

Sistem pencatatan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* atau dapat dikatakan sebagai sistem pencatatan sederhana. Sistem pencatatan seperti ini tidak melakukan penjurnalan terlebih dahulu, namun langsung mencatat pemasukan ketika ada penerimaan zakat, infak dan sedekah dan mencatat kas keluar ketika melakukan penyaluran.

C. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

PSAK 109 merupakan standar yang mengatur sistem pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat yang disahkan oleh telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan keuangan pada Oktober 2011. Dengan demikian, laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS haruslah sesuai dengan PSAK 109, yaitu

sesuai dengan prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

1. Pengakuan dana zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat, infak dan sedekah diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat, infak dan sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, infak dan sedekah. Apabila dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian asset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

Zakat non kas yang kami terima itu kami nilai dengan uang. misalnya untuk beras 1 liter maka kami menilai beras tersebut berapa harga beras 1 liter itu dipasaran (Rasmudin, *Wawancara*, 2018).

Berdasarkan keterangan diatas maka penentuan nilai asset non kas telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK relevan.

2. Pengukuran Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Berdasarkan PSAK 109 maka, dana zakat dan infak/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan mengakui asset nonkas lancar berdasarkan harga pasar. Sedangkan asset nonkas tidak lancar tidak tuangkan dalam laporan keuangan BAZNAS. Hal ini ditandai dengan tidak disajikannya bangunan, peralatan, dan mobil ambulance dalam laporan keuangan. Dengan demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak mengakui atau mencatat penyusutan sebagai penurunan nilai asset.

3. Penyajian Dana Zakat dan Infak/ Sedekah

PSAK 109 menjelaskan bahwa penyajian akuntansi zakat dan infak/ sedekah yaitu amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan

dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah. BAZNAS tidak mengakui adanya dana nonhalal karena lalulintas pembayaran zakat dan infak/sedekah tidak menggunakan jasa bank konvensional. Rekening bank konvensional hanya digunakan untuk operasional saja. Meski memisahkan dana zakat dan infak/sedekah, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan dana tersebut secara terpisah pada laporan posisi keuangan.

4. Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/sedekah

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. Dengan demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. Pengungkapan ini akan dituangkan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan, akan tetapi sebagai bentuk penjelasan atas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dituangkan dalam bentuk surat yang dikirimkan kepada muzakki setiap setelah dilakukannya penyaluran sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan kepada para muzakki. Surat pertanggungjawaban tersebut memuat:

- 6) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

- 7) Rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung oleh setiap mustahik.

5. Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi sebuah organisasi kepada *stakeholder*. Dalam PSAK 109 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi pengelola zakat. Komponen-komponen tersebut terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan),
- b. Laporan sumber dana dan perubahan dana,
- c. Laporan perubahan asset kelolaan,
- d. Laporan arus kas, dan
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya membuat satu dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu laporan posisi dana saja. Adapun penjelasan mengenai laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan jumlah asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak membuat laporan posisi keuangan.

- b. Laporan Sumber dan Perubahan Dana

Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Bentuk penyajian laporan sumber dan perubahan dana BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sangat jauh dari ketentuan PSAK 109. Laporan posisi dana tersebut hanya memuat jumlah dana zakat, dana operasional, dan deposito dimasing-masing rekening BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Laporan ini memuat daftar asset kelolaan yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat, seperti rumah sakit dan sekolah. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dua asset kelolaan yaitu rumah bersalin dan sekolah. Akan tetapi BAZNAS Provinsi tidak membuat laporan perubahan asset kelolaan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan aliran masuk dan keluarnya kas pada sebuah organisasi yang disajikan dalam suatu periode tertentu. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak membuat atau menyajikan laporan arus kas yang semestinya dilaporkan pada akhir periode akuntansi.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi yang tidak tertuang dalam tubuh laporan keuangan. Penjelasan ini dianggap sangat penting karena akan membantu pembaca laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya menyurati para muzaki pada saat dana zakat dan infak/sedekah

telah disalurkan tiap tahunnya sebagai bentuk penjelasan pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah yang mereka setorkan.

D. Perwujudan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109

Good zakat governance atau tata kelola zakat yang baik sangat diperlukan disetiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut Rahman (2015) karakteristik *good zakat governance* diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya pengelolaan infak/sedekah. OPZ dikatakan memiliki sistem *Good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi suatu OPZ dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka segala aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada suatu pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 ini digunakan sebagai acuan bagi setiap OPZ dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi zakat dan infak/sedekah serta menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan OPZ.

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dilihat dari bentuk pelaporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109. Selama ini bentuk pelaporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada aturan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa:

Kalau pedoman itu kami selalu mengacu pada aturan dari Kementerian Agama. Karena sebelumnya kami membuat sendiri bentuk pelaporannya dan setelah ada masukan-masukan dari Kementerian Agama maka kami membenahinya sesuai dengan aturan Kementerian Agama bagaimana model pelaporannya (Alwi, *Wawancara*, 2018).

Selain itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum pernah diaudit laporan keuangannya oleh auditor independen (akuntan publik). Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mewajibkan laporan keuangan BAZNAS harus diaudit oleh auditor independen. Namun, setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat bahwa setiap BAZNAS wajib diaudit oleh akuntan publik. Maka barulah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan pengauditan laporan keuangannya. Sebagaimana yang disampaikan informan bahwa:

Laporan keuangan kami belum pernah diaudit. Tapi saat ini kami sementara bernegosiasi dengan akuntan publik karena rupanya biayanya itu cukup mahal. Kan sekarang ada aturan baru dari BAZNAS pusat bahwa mulai tahun 2018 semua BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota harus diaudit oleh akuntan publik (Alwi, *Wawancara*, 2018).

Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan selama ini tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan. Namun, lebih berfokus pada penginformasian kepada para muzakki mengenai pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah. Penginformasian tersebut dilakukan secara tertulis yaitu dengan menyurati setiap muzakki terkait pengalokasian dana dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa:

Sebenarnya selama ini kami sudah melakukan yang namanya transparansi karena setiap kegiatan kami selalu melaporkannya kepada muzakki dengan cara menyurutinya. Sebenarnya tujuan dari adanya PSAK 109 kan untuk transparansi dan akuntabilitas nah selama ini kami juga sudah transparan dan akuntabel kepada masyarakat (Alwi, *Wawancara*, 2018).

.....Dan setiap setelah dilakukannya pendistribusian kami menyurati para muzakki bahwa dana yang mereka setor kami salurkan ke kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan (Alwi, *Wawancara*, 2018).

Berdasarkan keterangan diatas, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi tugasnya untuk tetap akuntabel dan transparan. Namun, apabila dilihat dari penyajian laporan keuangannya masih kurang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyajikan pos pos laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Idealnya, suatu laporan keuangan dikatakan akuntabel dan transparan apabila telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang ditetapkan untuk pelaporan keuangan BAZNAS adalah PSAK 109.

Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan *good zakat governance*. Dalam PSAK 109 memuat aturan-aturan yang membuat penyajian tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan. Dengan laporan keuangan BAZNAS yang mengacu pada PSAK 109, maka akan mewujudkan *good zakat governance* (tata kelola zakat yang baik) dibidang pelaporan keuangan. Meskipun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengingkari pentingnya penerapan PSAK 109 dalam mewujudkan *good zakat governance*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa:

Penerapan PSAK 109 yang merupakan sebuah keharusan maka idealnya untuk mencapai yang namanya transparansi dan good governance itu maka harus mengikuti PSAK 109 dan BAZNAS akan menuju ke penerapan PSAK 109 itu (Alwi, *Wawancara*, 2018).

Dalam penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya pemahaman BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tentang PSAK 109.
2. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dibidang akuntansi.
3. Latar belakang pendidikan pembuat laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan bidang akuntansi.
4. Kurangnya pelatihan-pelatihan tentang PSAK 109 yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang karena belum diterapkannya PSAK 109. Namun, setelah adanya aturan yang menegaskan bahwa setiap laporan keuangan BAZNAS harus diaudit mulai tahun 2018 maka BAZNAS Provinsi Sulawesi selatan berupaya untuk menerapkan PSAK 109.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah. Penghimpunan zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara UPZ. Pendistribusian zakat dan infak/sedekah sesuai dengan QS. At-taubah: 60 yang menggolongkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan melalui program-program pendayagunaan yang telah dilakukan, diantaranya program sekolah gratis, pengobatan gratis, dan bantuan modal usaha.
2. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan pencatatan *single entry* atau pencatatan sederhana. Komponen laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat laporan posisi dana, sedangkan menurut PSAK 109 komponen laporan keuangan terdiri dari lima, yaitu

neraca, laporan sumber dana dan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

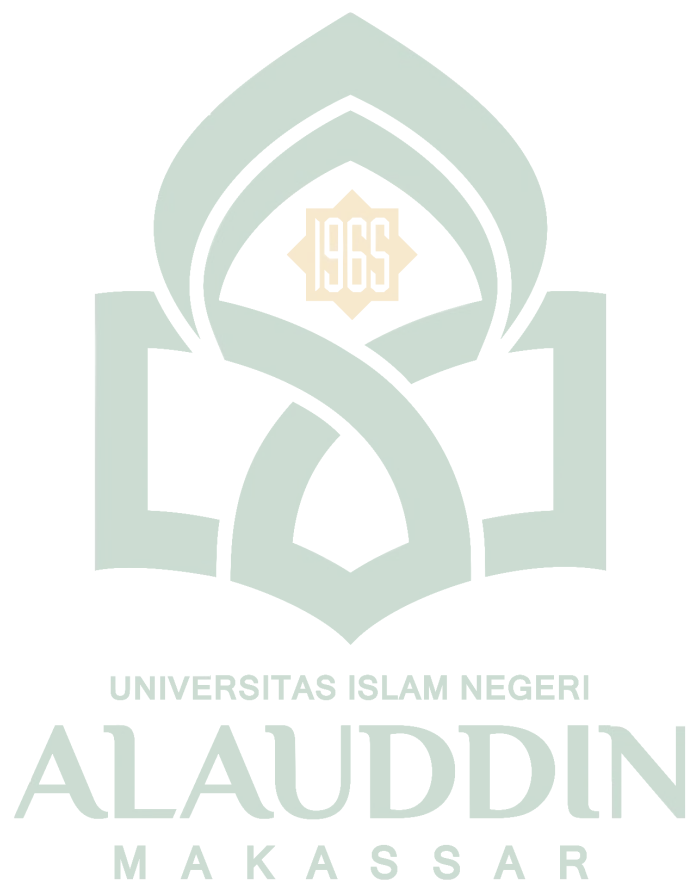
3. Perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan masih belum tercapai, lantaran PSAK 109 belum diterapkan. Organisasi pengelolaan zakat dikatakan memiliki sistem *Good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar, maka dibutuhkan PSAK 109 sebagai standar baku yang mengatur pelaporan keuangan zakat dan infak/sedekah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya segera menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan guna tercapainya *good zakat governance* dibidang pelaporan keuangan.
2. BAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil, oleh karena itu sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi dalam jajaran kepengurusan pada BAZNAS secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat mengetahui dan menerapkan PSAK 109.

3. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar terus mengikuti perkembangan penerapan PSAK 109. Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya bisa mengambil bukan hanya satu objek penelitian saja, tetapi bisa lebih dari satu objek penelitian agar peneliti selanjutnya mampu memperoleh perbandingan bagaimana penerapan PSAK 109 antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahannya, Departemen Agama RI. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Amelia, Erika. 2012. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). *Signifikan*. 1(2): 79-92.
- Angraeni, E. F., S. S. Pangemanan dan S.S. Rondonuwu. 2016. Application of Accounting Zakat, Infaq/Sedekah Based on PSAK 109 at Badan Amil Zakat Bitung City. *Jurnal EMBA*. 4(4): 1191 – 1199.
- Anton, FX. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*. 1(2): 61-80.
- Anwar, Azwar. 2013. Peran SPI Terhadap Pencapaian Opini WTP Dan Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan GUG (analisis Studi Pustaka).
- Ayuniyyah, Q. 2011. Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil Muzaki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*. 2(2): 1-16.
- Bashori, Ahmad Hasan. 2015. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Baz di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Integratif*. 1(1): 86-117.
- Budiarti, A. V., E. Masitoh dan Y. C. Samrotun. 2017. Evaluasi Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada Baznas Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 13(1): 41 – 47.
- Candra, Kresna Ramadhan. 2017. *Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Donaldson, L and J.H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory:CEOGovernance and Shareholder. *Returns Australian Journal of Management*, 16(1): 49-64.
- Fitriasuri dan A. K. Jaya. 2017. Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. *Jurnal Ilmiah MBIA*. 16(2): 117 – 126.
- Ghufraanaka dan D. F. Septiarini. 2016. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3(5): 375-390.

- Habib, Anang Ariful. 2016. The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*. 1(1): 1-19.
- Hermawan dan Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1(1): 12-24.
- Hisamuddin, Nur dan I. H. Sholikha. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 1(1): 1-36.
- Husain, Saddam dan W. Abdullah. 2015. Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *Iqtisaduna*. 1(2): 40-64.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/sedekah. Jakarta.
- Indriastuti, Maya dan L.M. Ifada. 2015. Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah. *Conference in Business, Accounting and Management*. 2(1): 309-319.
- Ipansyah, N., N. Rahmi dan R. Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir*. 1(1): 75-83.
- Istutik. 2013. Analisis implementasi akuntansi zakat dan Infak/sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1): 19-24.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 1(7): 506-517.
- Kristin, Ari dan Umah U. K. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU-DT Cabang Semarang). *Value Edded*. 7(2): 68-97.
- Leo, S. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Malik, Syaikh Muhammad Abdul Ar Rahman. *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Megawati, Devi dan Trisnawati Fenny. 2014. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 7(1): 40-59.

- Mohsin, Magda Ismail A. 2015. Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in Muslim Countries {Case Study: Salary Deduction Scheme of Malaysia}. *International Of Journal Islamic Management and Business*. 1(1): 40-59.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Mukhtaruddin, Relasari and Messa Felmania. 2014. Good Corporate Governance Mechanism, Corporate Social Responsibility Disclosure on Firm Value: Empirical Study on Listed Company in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Finance and Accounting Studies*. 2(1)
- Mustahal, Ahmad dan A. Kelib. 2017. Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12(1): 27-38.
- Nahdiah, Alvin. 2016. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Mesjid Jami' Al-Baitul Amien Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember.
- Novarela, Dori dan I. M. Sari. 2015. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2(2): 145-160.
- Pertiwi, R. A., M. Kholmi dan E. T. Kurniawati. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 5(2): 751-758.
- Pujianto dan Asrori. 2015. Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 4(1): 1-9.
- Puspitasari, Yulifa dan Habiburrochman. 2013. Penerapan PSAK No. 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4(3): 479-494.
- Rahman, Taufikur. 2015. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*. 6(1): 141-164.
- Rahmat, R., A. T. Atmaja, dan N. L. G. Sulindawati. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 7(1): 1-10.
- Raziq, Ahmad dan Widya Yanti. 2013. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lemabag Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 11(2): 20-47.

- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*. 1(1): 1-19.
- Sahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.
- Samsiyah, Sambharakhresna dan Kompyurini. 2013. Kajian implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau dari Syariah Enterprise Theory pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Jurnal Infestasi*. 9(1): 47-60.
- Setyawan, Aji Riza. 2015. *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soedarso, Elvyra Handayani. 2013. Penilaian Kinerja Fisik (Iviateri) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory dengan Nilai Tambah Syari'ah dan Zakat sebagai Indikator. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 1(3): 195-215.
- Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Syam, Fahrizal. "BAZNAS Sulsel Distribusikan 250 Paket Zakat ke Fakir Miskin". *Tribun Makassar Online*. 01 Juni 2018. <http://makassar.tribunnews.com/2018/06/01/baznas-sulsel-distribusikan-250-paket-zakat-ke-fakir-miskin> (10 Agustus 2018).
- Triuwono, Iwan. 2007. Mengangkat Sing Liyan untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *SNA X, Unhas Makassar*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahab, N.A. and A. R. A. Rahman. 2011. A Framework to Analyse The Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 2(1): 43-62
- Wasila, Siti., and Nanang Sonhadji. 2014. A Study on The Zakat and Infaq or Sadaqoh Accounting Application Under SFAS 109 in Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*. 4(2): 169 – 174.
- Wati, Ayu M. P., Djoko Kristianto., dan M. R. Sunarko. 2016. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Solo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 12(4): 428-438.

Yudianto, Agus. 2011. *Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Di Jawa Barat*. Tesis. Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati.

Yuliafitri, I. dan A. I. Rivaldi. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *Jurnal Infestasi*. 13(1): 217-226.





LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Juni 2018
 Informan : Rasmuddin, S.Ag
 Bagian : Keuangan, IT, dan Pelaporan

1. Bagaimana proses pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: kami menggunakan proses pencatatan akuntansi yang sederhana.

2. Apakah laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sudah pernah diaudit oleh auditor independen?

Jawaban: selama ini laporan keuangan BAZNAS belum pernah diaudit. Akan tetapi tahun ini laporan keuangan kami akan segera diaudit.

3. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulsel dipublis lewat apa?

Jawaban: laporan keuangan BAZNAS hanya dipublis di BAZNAS pusat. Jadi untuk para muzakki kami kirimkan secara pribadi laporan keuangan kami atau mereka yang datang ke BAZNAS apabila ingin melihat laporan keuangannya kami.

4. Dari mana sumber dana yang diperoleh BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: sumber dana BAZNAS ada dua yaitu dari muzakki dan Kementerian Agama. Akan tetapi yang lebih dominan itu dari muzakki. Dari kementerian agama hanya berupa bantuan operasional saja., itupun

dana dari Kementerian Agama tidak mengcover seluruh kegiatan operasional BAZNAS.

5. Apakah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menerima zakat non kas?

Jawaban: zakat non kasi yang kami terima itu kami niali dengan uang.misalnya untuk beras 1 liter maka kami menilai beras tersebut berapa harga beras 1 liter itu dipasaran, Karena kami menghindari adanya pengumpulan beras yang berbeda-beda dari setiap muzakki yang mengakibatkan kualitas beras yang akan kami salurkan kepada mustahik menjadi kurang bagus.

6. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut.

7. Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, apakah ada upaya untuk menerapkan PSAK 109?

Jawaban: kami tetap melakukan upaya tersebut. namun, untuk saat ini di BAZNAS ada yang namanya sistem SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Dengan sistem ini setiap penginputan akan ter-account di BAZNAS Pusat. Tapi kita tidak tabu untuk belajar PSAK 109. Saya sudah ikut pelatihan PSAK 109 tetapi rupanya sangat rumit. Kami

hanya menggunakan pencatatan sederhana yang menurut kami mudah dipahami.

8. Apa saja kendala BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan PSAK 109?

Jawaban: kendalanya itu yang pertama karena latar belakang pendidikan saya bukan dari ekonomi, dan kedua pelatihan yang diberikan kepada kami selama ini waktunya sangat terbatas. Menurut saya mustahil kami yang bukan dari ekonomi bisa langsung mengetahui PSAK 109 itu dalam waktu dua hari pelatihan saja.

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juli 2018
 Informan : Kamaruddin Natsir, S.Ag
 Bagian : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: Setiap yang datang membayar ZIS itu disertai dengan yang namanya Bukti Setoran Zakat (BSZ). Dari BSZ tersebut dapat dilihat zakat apa yang mereka setorkan karena di dalam formulir tersebut ada contengan zakat apa yang telah disetorkan. Dari BSZ itulah nanti yang dibawa bendahara ke bagian pelaporan keuangan.

2. Bagaimana sistem pendataan mustahiq di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: kalau sistem pendataan mustahiknya itu kita ada tim survey turun kelapangan untuk mendata. Kami mengambil biodata mereka lewat KTP mereka masing-masing.

3. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel?

Jawaban: penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang menyetor langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Di setiap instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang menyetor melalui instansi kemudian mereka mentransfer lewat bank.

4. Bagaimana sistematika penghimpunan dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel?

Jawaban: jadi kami memisahkan antara dana zakat, dana infak dan dana sedekah. Misalnya ketika ada muzakki yang membayar zakat dan zakat dia yang sebenarnya adalah Rp 375.000 akan tetapi yang dia setorkan adalah Rp. 400.000 dan menginfakkan sisanya, maka kami mencatat Rp. 375.000 masuk ke dana Zakat dan Rp. 25.000 masuk ke dana infak.

5. Apa saja jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

6. Bagaimana cara pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel?

Jawaban: Kalau di BAZNAS itu kami melakukan pendistribusian besar-besaran setiap bulan ramadhan. Pendistribusiannya itu ada dua macam yaitu:

- a. berbentuk konsumtif, inilah yang kami bagi habis
- b. berbentuk produktif, berupa bantuan modal usaha. Misalnya kami meminjamkan modal usaha Rp. 1.000.000, maka uang itu akan dikembalikan dalam 10 bulan. Kemudian setelah uang tersebut dibayarkan kembali oleh si peminjam maka kita pinjamkan lagi kepada mustahik lain yang membutuhkan modal usaha.

7. Kepada siapa saja pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel disalurkan?

Jawaban: sesuai dengan Alquran ada 8 asnaf, namun terkadang semua asnaf tersebut tidak tercover karena tidak semua asnaf tersebut ada dalam daftar mustahik.

8. Kegiatan apa sajakah yang telah dilakukan dalam rangka pendayagunaan zakat infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: kegiatannya selain pendistribusian kepada 8 asnaf itu,

- a. kegiatannya ada untuk kegiatan pendidikan berupa disediakan sekolah gratis SD, SMP dan SMK. Mereka hanya datang belajar dan kami yang menyediakan semua sarana dan prasarannya dari dana ZIS tersebut.

- b. kegiatan selanjutnya yaitu kami menyediakan klinik bersalin Cuma-Cuma untuk ibu hamil dan mungkin sekarang sudah ada sekitar 2000an ibu hamil yang telah berobat mulai dari kontrolnya sampai mereka melahirkan.
- c. Setiap hari sabtu kami adakan sunatan yang juga tidak dipungut biaya. Dananya diambil dari dana ZIS.

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juli 2018

Informan : Dr.dr.H. Khidri Alwi, M.Kes

Bagian : Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

1. Apakah laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sudah pernah diaudit?

Jawaban: Laporan keuangan kami belum pernah diaudit. Tapi saat ini kami sementara bernegosiasi dengan akuntan publik karena rupanya biayanya itu cukup mahal. Kan sekarang ada aturan baru dari BAZNAS pusat bahwa mulai tahun 2018 semua BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota harus diaudit oleh akuntan public

2. Bagaimana penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: kalau penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi itu kami belum terapkan. Akan tetapi setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan

oleh BAZNAS pusat insyaallah kami akan melakukan pembenahan dan berupaya untuk menerapkan PSAK 109 itu.

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: sebenarnya selama ini kami sudah melakukan yang namanya transparansi karena setiap kegiatan kami selalu melaporkannya kepada muzakki dengan cara menyuratnya. Sebenarnya tujuan dari adanya PSAK 109 kan untuk transparansi dan akuntabilitas nah selama ini kami juga sudah tansparan dan akuntabel kepada masyarakat Cuma mungkin penyajian laporan keuangannya yang berbeda. Namun mungkin lebih bagus lagi kalau ada aturan yang mengikat mengenai pelaporan keuangan tersebut.

4. Bagaimana sistem plaporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: sistem pelaporannya itu masih secara manual. Kami hanya menginput laporan di Sistem Informasi Manajemen Baznas dan laporan itu langsung terbaca di BAZNAS pusat.

5. Hal apa saja yang menjadi wajib untuk di ungkapkan didalam laporan keuangan zakat dan infak/ sedekah?

Jawaban: **semua** bentuk pengeluaran dan pemasukan wajib untuk dilaporkan. Pokoknya setiap dilakukannya kegiatan di BAZNAS pasti ada laporannya. Jadi lebih tansparan. Dan setiap setelah dilakukannya

pendistribusian kami menyurati para muzakki bahwa dana yang mereka setor kami salurkan ke kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan

6. Pentingkah PSAK 109 diterapkan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

Jawaban: iya sangat penting karena penerapannya merupakan sebuah keharusan bagi setiap BAZNAS untuk mengacu ke PSAK 109.

7. Apa peluang dan tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel dalam mengimplementasikan PSAK 109?

Jawaban: kalau peluangnya itu, sebenarnya penerapan PSAK 109 itu merupakan sebuah keharusan yang wajib dilakukan oleh BAZNAS sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Jadi pasti nantinya kami akan mengacu ke PSAK 109 itu. Kalau tantangannya itu karena selama ini kami masih melakukan pencatatan yang manual jadi semuanya itu harus dibenahi mulai dari sistem pencatatannya. Jadi kami harus mampu beradaptasi dengan PSAK 109 itu.

8. Apakah pedoman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban: kalau pedoman itu kami selalu mengacu pada aturan dari Kementerian Agama. Karena sebelumnya kami membuat sendiri bentuk pelaporannya dan setelah ada masukan-masukan dari Kementerian Agama maka kami membenahinya sesuai dengan aturan Kementerian Agama bagaimana model pelaporannya.

9. Apabila nanti diterapkan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sulsel, apakah PSAK 109 memiliki peran dalam mewujudkan *good zakat governance*?

Jawaban: penerapan PSAK 109 yang merupakan sebuah keharusan maka idealnya untuk mencapai yang namanya transparansi dan good governance itu maka harus mengikuti PSAK 109 dan BAZNAS akan menuju ke penerapan PSAK 109 itu.



LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI WAWANCARA**



PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji dan pembimbing penelitian skripsi saudara **St. Fatimah**, NIM: **90400114156**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“Mewujudkan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

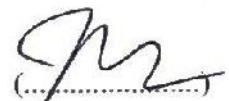
Samata-Gowa, 14 Agustus 2018

Dewan Penguji dan Pembimbing

Penguji 1 : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.



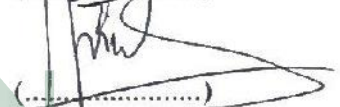
Penguji 2 : Memen Suwandi, SE., M.Si.



Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.



Pembimbing 2 : Jamaluddin M, SE., M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ST. FATIMAH 90400114156**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**Mewujudkan *Good Zakat Governance* Melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Juli 2018

Pembimbing I


Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Pembimbing II


Jamaluddin Majid, SE., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **ST. FATIMAH 90400114156**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**Dimensi Good Zakat Governance Melalui PSAK 109 Ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)**", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Februari 2018

Pembimbing I


Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Pembimbing II


Jamaluddin Majid, SE., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I Jl Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax 864923
Kampus II Jl H M Yasin Lumpo Romang polong - Gowa ■ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL PROPOSAL

**MEWUJUDKAN *GOOD ZAKAT GOVERNANCE* MELALUI PSAK 109
DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM
(Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)**

Samata-Gowa, 22 Maret 2018

Penyusun

St. Fatimah

NIM. 90400114156

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

Pembimbing II

Jamaluddin Majid, SE., M. Si
NIP. 19720611 200801 1 013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Disetujui Oleh :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin M. SE., M. Si
NIP. 19720611 200801 1 013



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II Jl. H. M. Yasin Lomp. No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 5707 /EB.I/PP.00.9/8/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Samata, 23 Agustus 2018

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : St. Fatimah
NIM : 90400114156
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Mewujudkan good zakat governance melalui PSAK 109 ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Agustus 2018
Waktu : 13.00 - 15.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

Nomor : 5389 /EB.I/PP.00.9/07/2018
Sifat : Perintah
Lamp : -
Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, 07 Agustus 2018

Kepada Yth
Bapak/Ibu Peneliti dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : St. Fatimah
NIM : 90400114156
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Mewujudkan Good zakat Governance melalui psak 109 di tinjau syariat Islam (Studi pada Baznas Provinsi Sulawesi Selatan)
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2018
Waktu : 09.00 - 16.00 WITA
Tempat : Ruang Seminar 204

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Molli D. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 195802211987031002

ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl Slt Alauddin No. 63 Makassar Tlp (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl H.M. Yasin Lempo No.36, Romangpolong - Gowa Tlp (0411) 841879, Fax (0411) 8221400

Nomor
Lampiran
Hal

2478 /EB I/PP 00.9/2018

Samata, 19 Maret 2018

: Undangan Seminar Proposal
A.n. ST. Fatimah/90400114156

Kepada Yth :

1. Prof.Dr.HAmbo Asse,M.Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Jamaluddin Majid,SE.,M.Si. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018

Waktu : 09.00 - 12.00

Judul Skripsi : Dimensi Good zakat governance melalui PSAK 109 di
Tinjau dari QS At- Taubah : 60 Dan 103 (Studi pada Badan
Amil Zakat Nasional Kota Makassar)

Tempat : Ruang 106

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

ALA UDDIN
M A K A S S A R





UIN ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1254 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan : **St. Fatimah**
NIM : **90400114156**
Tanggal : **15 Agustus 2018**
Mahasiswa Jurusan : **AKUNTANSI**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Mewujudkan good zakat governance melalui PSAK 109 ditinjau dari Syariat Islam (Studi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan)**"
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : **Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**
Sekretaris : **Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.**
Penguji I : **Prof. Dr. Mukhlis Lutfi, M.Pd.**
Penguji II : **Memen Suwandi, SE., M.Si.**
Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**
Pembimbing II : **Jamaluddin M., SE., M.Si.**
Pelaksana : **Arnidar Hamid, A.Md.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **20 Agustus 2018**
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1066 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.St. Fatimah, NIM : 90400114156
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, St. Fatimah, NIM: 90400114156 untuk melaksanakan seminar hasil
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Pembimbing II : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Penguji I : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Penguji II : Memen Suwandl, SE., M.Si.
Pelaksana : Arnidar Hamid, A.Md.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan mengucap masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kedua

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

M A K A S S A R

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : 1 Agustus 2018

Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 198703 1 002

Lampiran :

1. Keputusan Anggapan Mahasiswa di Samata-Gowa
2. Permohonan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Asli



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 880 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **St. Fatimah** : NIM: 90400114156
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris	: Drs. H. M. Ridwan, M.Si
Penguji Dirasah Islamiyah	: Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.
Penguji Akuntansi Keuangan	: Jamaluddin M, SE., M.Si
Penguji Auditing	: Uince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
Pelaksana	: Isna Kumalasari, S.Ag., M.Pd.
 2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
 4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **13 Juli 2018**
Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
 2. Para Dekan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 244 Tahun 2018

T E N T A N G
**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah

- Membaca** Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, ST. Fatimah Nim: 90400114156 tertanggal untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Dimensi Good zakat governance melalui PSAK 109 di Tinjau dari QS At- Taubah : 60 Dan 103 (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)
- Menimbang**
- a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
 - b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - 4 Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - 5 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
 - 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

M E M U T U S K A N

- Pertama** Mengangkat / Menunjuk Saudara
- 1 Prof Dr H. Anibo Asse, M. Ag
 - 2 Jamaluddin Majid, SE., M. Si
- Kedua** Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah
- Ketiga** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di
Pada tanggal

Samata-Gowa
: 12 Februari 2018



PROF. DR. H. AMBO ASSE, M. Ag
9040221987031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata-Gowa ☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : St. Fatimah
NIM : 90400114156
Judul : Mewujudkan *Good Zakat Governance* melalui PSAK 109
Ditinjau dari Syariat Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
Pembimbing II : Jamaluddin Majid, SE., M.Si

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 22%. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Munaqasyah.

Makassar, 30 Juli 2018

TIM Instruktur FEBI


Satriani S.I.P.

***Catatan:**

1-24% "Tidak Terindikasi Plagiat"

25-49% "Revisi Minor, Silahkan konsultasikan dengan Pembimbing"

50-74% "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"

75-100% "Revisi Total"

***Coret yang tidak perlu**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6919/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAZNA Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2494/EB.I/PP.00.9/03/2018 tanggal 19 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ST. FATIMAH
Nomor Pokok : 90400114156
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Lembaga
Alamat : Jl. SII Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :
" DIMENSI GOOD ZAKAT GOVERNANCE MELALUI PSAK LOG DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Mei s/d 28 Juni 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 24 Mei 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Portinggal*

SIMAP PTSP 24-05-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2t1bkomd.sulselprov.go.id> Email : p2t1prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/B/ BAZNAS-Prov.SulSel/VII/2018

Makassar, 30 Juni 2018

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Drs. H. Mappagio, M.Si
Jabatan : Ketua BAZNAS Prov. SULSEL

Menerangkan bahwa Saudari :

Nama : ST. Fatimah
Stambuk : 90400114156
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Telah melaksanakan Penelitian tanggal 28 Mei s/d 28 Juni 2018 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Judul (DIMENSI GOOD ZAKAT GOVERNANCE MELALUI PSAK 109 DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM (STUDI PADA BAZNAS PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. H. Mappagio, M.Si
Ketua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Kantor : Jl. Masjid Raya No. 55 Makassar Telp. (0411) 3634324 - Fax (0411) 3634324

Bankir :

• Bank Sulselbar 130.003.000019518.4 • Bank Syariah 510.053.000000.25 7 • Bank Muamalat 801.004.8900
• Bank Syariah Mandiri 700.2402.704 • Bank BNI Syariah 600.600.700.8 • Bank BTN Syariah 705.1003.673 •

RIWAYAT HIDUP



St. Fatimah, dilahirkan di Mala-mala, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 April 1996. Anak ke 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara. Pasangan dari ayahanda **Ahmar** dan Ibunda **Syamsudduha**.

Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Mala-Mala, Kec. Kodeoh, Kab. Kolaka Utara pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008 pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kodeoha, Kab. Kolaka Utara dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kodeoha, jurusan IPA, dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R